

PERANG DI SAHARA BARAT: SENGKETA WILAYAH ATAU PERJUANGAN KEMERDEKAAN?

Budi S. SATARI*

PENDAHULUAN

Selama bertahun-tahun Sahara Barat merupakan suatu wilayah yang kurang dikenal dan kurang mendapatkan perhatian dari para pengamat politik internasional. Tetapi dalam 10 tahun terakhir ini wilayah tersebut mulai menjadi salah satu pusat perhatian para pengamat politik internasional dan para pemimpin negara khususnya di Afrika dan Timur Tengah. Hal itu disebabkan oleh timbulnya suatu sengketa antara Maroko, Mauritania, Aljazair dan gerakan Polisario yang masing-masing menuntut kedaulatan atas Sahara Barat. Gerakan Polisario, yang didukung oleh Aljazair, menyatakan bahwa mereka adalah satu-satunya gerakan yang mewakili rakyat Sahrawi dalam perjuangan kemerdekaan Sahara Barat itu.

Perang yang berlangsung dengan berlarut-larut itu menelan korban jiwa dan biaya yang tidak sedikit sehingga merupakan beban yang berat bagi semua pihak yang terlibat. Tetapi kelihatannya sejauh ini tidak ada usaha yang sungguh-sungguh untuk mencari jalan damai yang memuaskan bagi semua pihak. Usaha-usaha diplomatis baik di forum regional maupun di forum internasional selalu menemui kegagalan. Demikian pula usaha-usaha negara-negara netral untuk menengahi masalah ini sering menemui jalan buntu. Ketidakstabilan politik dalam negeri negara-negara yang terlibat dalam sengketa ini juga mempengaruhi (dan dipengaruhi oleh) perang yang berlarut-larut ini. Keengganan negara-negara superpower untuk melibatkan diri dalam masalah ini membantu mencegah meluasnya perang tersebut. Tetapi peranan negara-negara superpower dalam mengusahakan penyelesaian masalah wilayah Sahara Barat itu sangatlah diharapkan, terutama dengan memberikan bantuan keuangan guna memperbaiki keadaan ekonomi di negara-negara yang terlibat dalam perang yang berlarut-larut ini.

* Staf CSIS



Diambil dari Conflict Studies, No. 88, Oktober 1977, hal. 8

SENGKETA WILAYAH DI SAHARA BARAT

Sejak akhir abad ke-19, Sahara Barat merupakan daerah jajahan Spanyol, sedangkan Maroko, Aljazair dan Mauritania adalah daerah jajahan Perancis. Sebelum masa penjajahan, persengketaan antara kerajaan-kerajaan di wilayah itu mengenai perbatasan telah sering terjadi. Tetapi selama masa penjajahan masalah perbatasan itu tidak pernah ditentukan dengan jelas karena kedua pemerintah kolonial itu mengakui adanya lingkungan pengaruh (*sphere of influence*) satu sama lain di daerah perbatasan.

Setelah Maroko, Aljazair dan Mauritania memperoleh kemerdekaan, perebutan wilayah itu timbul kembali. Perebutan wilayah antara Maroko dan Aljazair atas daerah Tindouf adalah akibat kebijakan Perancis di masa penjajahan. Selama Perancis berkuasa, Tindouf dianggap sebagai wilayah Maroko. Tetapi pada saat memuncaknya gerakan nasionalisme Maroko, di daerah itu ditemukan simpanan bijih besi yang cukup besar. Maka Perancis memindahkan administrasi daerah tersebut sebagai wilayah Aljazair, karena Perancis menganggap bahwa kedudukannya di Aljazair jauh lebih aman dibandingkan dengan di Maroko. Pemindahan kedaulatan atas wilayah itu tidak diakui oleh gerakan nasionalis Maroko. Perebutan wilayah itu telah menyebabkan pecahnya perang antara Maroko dan Aljazair pada tahun 1963.¹

Antara tahun 1966-1973, Maroko, Aljazair dan Mauritania bersama-sama mendukung berbagai gerakan pembebasan Sahrawi menentang pendudukan Sahara Barat oleh Spanyol. Spanyol bersedia untuk meninggalkan wilayah itu, tetapi harus menghadapi dua pilihan, yaitu memberikan kemerdekaan pada rakyat Sahrawi (yang dianggap belum siap) atau membagi wilayah itu kepada Maroko dan Mauritania. Pada mulanya Presiden Boumedienne dari Aljazair tidak berkeberatan terhadap tuntutan Maroko atas wilayah itu dan menyetujui rencana pembagian wilayah Sahara Barat kepada Maroko dan Mauritania. Tetapi ketidaksenangan Boumedienne terhadap keluarga kerajaan Maroko menyebabkan ia berubah pikiran dan menentang tuntutan kedaulatan Maroko atas daerah tersebut.²

Pemerintah Aljazair tidak pernah secara resmi menuntut kedaulatan atas wilayah tersebut. Tetapi sebenarnya Aljazair mempunyai kepentingan ekonomi di Sahara Barat yaitu daerah pertambangan fosfat di Bou Craa. Di samping itu, mereka juga menginginkan pelabuhan AL Ayoun guna mengeksport bijih besi dari pertambangan mereka di Gara Djebilet. Aljazair beranggapan

1 James Dougherty, "The Polisario Insurgency: War and Minuet in North-West Africa", *Conflict*, vol. 2, no. 2, 1980, hal. 95

2 *Ibid.*, hal. 96

bahwa dengan mendukung gerakan pembebasan Sahara Barat mereka dapat memperoleh keuntungan dari wilayah itu. Itulah sebabnya mereka mendukung sepenuhnya Front Pembebasan Rakyat Saguia el Hamra dan Rio de Oro (Polisario) yang didirikan pada tahun 1973.¹

Sebelum berdirinya Polisario berbagai gerakan pembebasan rakyat Sahrawi telah dibentuk, baik di Aljazair maupun di Maroko. Pada umumnya gerakan-gerakan tersebut hanya mengadakan kegiatan politik untuk mengakhiri pendudukan Spanyol di wilayah itu. Karena kurang mendapat dukungan dan karena program yang kurang terarah, gerakan-gerakan itu akhirnya membubarkan diri. Pada bulan Mei 1973 berdirilah Polisario yang menitik beratkan pada kegiatan-kegiatan militer terhadap pasukan-pasukan Spanyol di Sahara Barat.²

Pada mulanya kegiatan-kegiatan Polisario ini tidak terkoordinasi dengan rapi. Tetapi sejak bulan Nopember 1975 gerakan pembebasan Sahrawi ini mendapat senjata, latihan, pengobatan, dan indoktrinasi yang teratur dari angkatan bersenjata Aljazair. Di samping itu mereka juga mendapatkan tempat berlindung di Tindouf. Lebih jauh lagi, pasukan-pasukan Aljazair kadang-kadang ikut serta dalam operasi militer Polisario di wilayah Maroko. Kekalahan pasukan gabungan Polisario-Aljazair dalam serangkaian pertempuran menunjukkan kelemahan aliansi tersebut, sehingga perlu diadakan suatu reorganisasi dan perubahan strategi. Tanpa bantuan Aljazair, jelas bahwa Polisario tidak akan mampu menghadapi kekuatan militer gabungan Maroko-Mauritania. Maka Polisario mengubah taktik mereka dengan memusatkan serangan-serangan mereka pada sasaran-sasaran ekonomi di wilayah Mauritania yang lebih lemah baik dalam hal ekonomi maupun dalam kekuatan angkatan bersenjata.

Usaha-usaha penyelesaian konflik di Sahara Barat itu, baik di forum regional (OAU) maupun di forum internasional (PBB), tidak mencapai hasil yang memuaskan. Maka pada bulan Nopember 1975 Raja Hassan mengorganisasi suatu "penyerbuan secara damai" ke wilayah Sahara Barat, yaitu dengan membariskan 350.000 rakyat Maroko yang tidak bersenjata ke daerah tersebut. Pasukan Spanyol yang di tempatkan di daerah tersebut tidak dapat berbuat apa-apa dan akhirnya mengundurkan diri dari wilayah yang dituntut oleh Maroko. Penyerbuan Maroko yang bersifat simbolis itu dilakukan setelah Mahkamah Internasional menyatakan bahwa Maroko dan Mauritania tidak mempunyai hak kedaulatan historis atas wilayah yang dipersengketakan

1 David Lynn Price, "Marocco and the Sahara: Conflict and Development", *Conflict Studies*, no. 88, Oktober 1977, hal. 4

2 *Ibid.*, hal. 5

itu. Beberapa hari setelah kejadian itu, Spanyol, Maroko dan Mauritania mengumumkan suatu persetujuan bersama di mana Sahara Barat dibagi dua. Sebelah utara untuk Maroko dan sebelah selatan untuk Mauritania. Pasukan-pasukan Spanyol akan segera ditarik dari wilayah tersebut. Segera setelah pasukan Spanyol yang terakhir meninggalkan wilayah tersebut pada bulan Pebruari 1976, Polisario memproklamasikan berdirinya Republik Demokrasi Arab Sahrawi (RASD) yang didukung oleh Aljazair.¹ Maka perjuangan Polisario kini bukan saja dalam bentuk kegiatan militer terhadap Maroko dan Mauritania, tetapi juga dalam bentuk perjuangan politis dan diplomatis dalam fora internasional.

Perang memperebutkan wilayah Sahara Barat itu sebenarnya merupakan beban yang berat bagi semua pihak yang terlibat, baik dari segi ekonomi, politis maupun korban jiwa. Peningkatan anggaran belanja militer dalam jumlah yang tidak kecil merupakan hambatan yang besar bagi pembangunan ekonomi negara-negara yang bersengketa itu. Perang yang berlarut-larut ini juga menimbulkan suatu keresahan dalam politik domestik negara-negara itu. Ketidakmampuan para pemimpin negara-negara itu untuk mencari jalan ke luar yang memuaskan dalam penyelesaian sengketa itu menyebabkan rasa tidak puas kelompok-kelompok tertentu (umumnya kelompok militer dan politikus) di Maroko, Aljazair dan Mauritania.

Sementara itu penempatan pasukan Maroko dalam jumlah yang besar ke wilayah Mauritania telah menimbulkan kecemasan kalangan militer negara itu bahwa Maroko akan menduduki Mauritania. Sebenarnya penempatan pasukan Maroko itu adalah untuk memperkuat pertahanan Mauritania yang karena kelemahan ekonomi dan angkatan bersenjataanya telah menjadi sasaran utama para gerilyawan Polisario. Pada pertengahan tahun 1978, Presiden Ould Daddah digulingkan dan diganti oleh Letnan Kolonel Mustafa Ould Mohammad Salek yang mengumumkan bahwa Mauritania mengharapka usaha OAU untuk menyelesaikan masalah Sahara Barat itu.² Minggu-minggu berikutnya pemerintah baru Mauritania menghentikan perjuangan melawan Polisario. Demikian pula pemimpin Polisario memutuskan untuk menghentikan serangan terhadap Mauritania guna memberikan kesempatan kepada Pemerintah Mauritania yang baru mengadakan penilaian kembali atas kebijakan nasional mereka.³ Hal itu menambah beban bagi Maroko yang terpaksa harus berjuang sendiri tanpa persenjataan dan perlengkapan yang memadai. Di samping itu, untuk mempertahankan kredibilitasnya

1 Brian Weinstein, "The Western Sahara", *Current History*, vol. 78, no. 455, hal. 114

2 William H. Lewis, "North Africa: Struggle for Primacy", *Current History*, vol. 76, no. 445, Maret 1979, hal. 131

3 Dougherty, *op. cit.*, hal. 104

Maroko harus berhasil dalam program pembangunan wilayah Maroko di Sahara Barat itu. Program tersebut meliputi penempatan penduduk nomadis, pengadaan air, pelayanan kesehatan dan pendidikan. Sebagian besar dana untuk program tersebut disediakan oleh Pemerintah Maroko, sisanya harus diperoleh dari bantuan internasional, khususnya dari negara-negara Arab lainnya dan juga dari PBB dan Bank Dunia.¹

SAHARA BARAT SEBAGAI MASALAH REGIONAL

Dalam KTT Arab yang diadakan di Rabat pada tahun 1974, Presiden Boumedienne menyatakan bahwa tidak ada permasalahan antara Maroko dan Aljazair. Tetapi sejak konperensi itu bantuan Aljazair terhadap Polisario semakin meningkat. Bahkan ada bukti-bukti yang menunjukkan bahwa pasukan Aljazair terlibat dalam serangkaian penyerangan ke wilayah Maroko. Secara resmi Pemerintah Aljazair tidak pernah menyatakan perang terhadap Maroko, sehingga tindakan itu menyebabkan Maroko memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Aljazair pada bulan Maret 1976.

Sengketa di Sahara Barat ini sering dimasukkan dalam agenda sidang OAU, tetapi sejauh ini belum diperoleh suatu penyelesaian yang memuaskan. Dunia Arab pada umumnya mendukung Maroko dalam masalah ini, baik secara politis maupun dalam hal keuangan. Peranan Maroko dalam perang Arab-Israel membuat ia mempunyai kedudukan politis yang cukup penting di dunia Arab. Tetapi di Afrika, Maroko kurang mendapat dukungan, terutama akibat keterlibatannya dalam kudeta yang gagal di Benin (Benin adalah negara Marxis yang mendukung Polisario) pada bulan Januari 1977. Hanya setelah Maroko mengirim pasukan ke Zaire untuk membantu Presiden Mobutu menghadapi serbuan Komunis dari Angola, citra Maroko di Afrika pulih kembali. Dalam pertemuan OAU di Libreville pada bulan Juli 1977, negara-negara Afrika memberikan dukungan pada Maroko dan memutuskan untuk mengadakan KTT khusus mengenai masalah Sahara ini. Hal itu sebenarnya kurang menguntungkan bagi Maroko. Masalah yang timbul di bagian selatan Afrika menyebabkan ditundanya pertemuan itu, sehingga untuk sementara waktu Maroko dapat mempersiapkan diri untuk mengambil langkah-langkah selanjutnya.²

Keadaan politik dalam negeri Aljazair juga ikut memegang peranan yang penting dalam masalah Sahara Barat ini. Keadaan ekonomi yang buruk

1 Price, *op. cit.*, hal. 9

2 *Ibid.*, hal. 13

menyebabkan perang Sahara itu merupakan beban bagi rakyat Aljazair. Kritik-kritik yang tajam mulai ditujukan atas kultus individu dan pemerintahan totaliter Presiden Boumedienne. Kelompok oposisi menyatakan bahwa petualangan politik luar negeri di Sahara Barat itu hanyalah untuk mengalihkan perhatian masyarakat dari keadaan dalam negeri yang semakin memburuk. Untuk mengatasi masalah ekonominya itu Aljazair jelas membutuhkan bantuan keuangan dari negara-negara lain. Tetapi bantuan semacam itu tentu saja akan disertai dengan berbagai persyaratan politis yang mungkin tidak akan menguntungkan bagi Aljazair.

Meninggalnya Presiden Boumedienne pada akhir tahun 1978, ternyata tidak mengubah keadaan. Kolonel Chadli Benjedid yang menggantikan Boumedienne tetap berpegang pada kebijakan yang telah digariskan oleh Boumedienne. Maroko menyatakan bahwa sebenarnya telah ada rencana perundingan damai dengan Aljazair yang tertunda akibat sakitnya Presiden Boumedienne. Sementara itu, kegiatan diplomatik dalam fora internasionalpun tidak menguntungkan bagi Maroko. Sidang OAU di Monrovia pada bulan Desember 1979 telah memutuskan bahwa Maroko harus menarik semua pasukannya dari Sahara Barat. Sidang itu juga menghimbau semua pihak yang terlibat untuk mengadakan gencatan senjata supaya di wilayah itu dapat diadakan referendum untuk menentukan masa depannya sendiri. Sebelumnya, pada bulan Nopember 1979, Majelis Umum PBB telah mengeluarkan suatu resolusi yang mendukung Polisario. Resolusi itu disepakati oleh 85 negara melawan 6 negara (Gabon, Saudi Arabia, Maroko, Guatemala, Guinea Ekwatorial dan Republik Afrika Tengah).

Di dalam negeri sendiri timbul anggapan bahwa perang Sahara itu merupakan beban yang berat bagi rakyat Maroko. Perpecahan juga terjadi di kalangan perwira angkatan bersenjata. Sebagian perwira menganjurkan untuk menarik diri dari Sahara, sedangkan sebagian lagi menganjurkan untuk menyerang Aljazair untuk memaksa Presiden Chadli Benjedid untuk berunding.¹ Keresahan di kalangan militer itu juga merupakan ancaman bagi kedudukan Raja Hassan yang telah berulang-ulang mengalami percobaan kudeta yang selalu berhasil digagalkan. Pada dasarnya rakyat Maroko mendukung perang itu. Tetapi apabila diharuskan memilih antara ekonomi yang sehat atau tujuan nasionalis, mereka tentu saja akan memilih yang pertama. Serangan-serangan gerilya Polisario terhadap kota Tan Tan dan berbagai instalasi militer dengan hasil yang memuaskan telah menggoyahkan keyakinan rakyat Maroko.² Dengan masalah-masalah ekonomi yang timbul, misalnya inflasi, pengangguran, pemogokan buruh, penurunan nilai ekspor fosfat dan kebutuhan

1 "Marocco: Intensified Isolation", *Africa Confidential*, vol. 21, no. 1, Januari 2, 1980, hal. 5

2 Weinstein, *op. cit.*, hal. 136

minyak yang semakin meningkat, makin sulitlah bagi Maroko untuk terus berperang.

KETERLIBATAN SUPERPOWER

Dalam masalah Sahara Barat ini kelihatannya Amerika Serikat dan Uni Soviet berusaha untuk bersikap netral. Hal ini disebabkan oleh kepentingan ekonomi mereka di wilayah tersebut. Meskipun secara politis Maroko adalah sekutu Amerika Serikat (Maroko adalah satu-satunya negara Arab yang mendukung persetujuan Camp David), Amerika Serikat mempunyai hubungan dagang yang menguntungkan dengan Aljazair. Untuk tidak menyinggung Aljazair, yang merupakan penyalur utama gas alam cair bagi Amerika Serikat, maka Amerika Serikat telah menolak keinginan Maroko untuk membeli senjata-senjata baru seperti pesawat kontra-insurgensi OV-10 Bronco, helikopter Bell/Cobra dan alat-alat pengamatan elektronika yang sangat dibutuhkan dalam perang di Sahara itu. Alasan Amerika Serikat ialah ia tidak mengizinkan penggunaan senjatanya di luar wilayah negara pembeli. Karena ia tidak mengakui pendudukan Maroko di Sahara Barat, ia tidak mengizinkan pembelian senjata oleh Maroko itu. Dalam menghadapi masalah pembelian senjata ini Maroko terpaksa berpaling ke Perancis yang merupakan pasaran bebas persenjataan di dunia. Perancis yang sejauh ini telah terlibat dalam pertahanan Mauritania bersedia melakukan kerja sama dengan Maroko baik dalam hal penjualan senjata maupun dalam hal dukungan politis dan kerja sama operasi militer. Penjualan senjata baru bagi Maroko itu dibiayai oleh Saudi Arabia.¹

Demikian pula keengganan Uni Soviet untuk menyediakan persenjataan bagi Aljazair adalah disebabkan oleh kepentingan ekonominya di Maroko. Maroko adalah penyalur fosfat yang terbesar bagi Uni Soviet dan Uni Soviet adalah penyalur minyak mentah terbesar kedua setelah Irak bagi Maroko. Di samping itu Uni Soviet dan Maroko mempunyai perjanjian penangkapan ikan. Pada pemungutan suara di PBB mengenai masalah Sahara Barat ini Uni Soviet mendukung usul Aljazair untuk penentuan nasib sendiri di wilayah tersebut. Tetapi Uni Soviet tidak mengakui Polisario dan tidak pernah mengundang para pemimpin gerakan tersebut ke Moskwa.² Maka jelas terlihat bahwa kedua superpower itu berusaha untuk tidak melibatkan diri.

Dengan demikian, seperti telah dikatakan di atas, satu-satunya sumber

1 Dougherty, *op. cit.*, hal. 103

2 David Lynn Price, "The Western Sahara", *The Washington Papers*, vol. VII, no. 63 (Beverly Hills: SAGE, 1979), hal. 63-64

persenjataan yang masih terbuka bagi Maroko adalah Perancis. Kerja sama operasi militer di wilayah Sahara Barat antara Maroko dan Perancis juga terjalin. Pesawat-pesawat tempur Perancis yang di tempatkan di Mauritania telah menyerang kelompok-kelompok gerilya Polisario. Keterlibatan Perancis secara langsung dalam konflik ini antara lain disebabkan oleh terbunuhnya beberapa warga negara Perancis dalam penyerbuan-penyerbuan Polisario ke pertambangan-pertambangan fosfat. Lagi pula, Perancis mempunyai perjanjian kerja sama dengan Mauritania. Dukungan Perancis terhadap Maroko itu menyebabkan Aljazair melakukan boikot ekonomi terhadap Perancis, antara lain dengan mengurangi impor dari Perancis. Tetapi hal itu tidak mempengaruhi politik luar negeri Perancis di kawasan itu. Malah Perancis memutuskan untuk mengimpor minyak dari Saudi Arabia sebagai pengganti minyak dari Aljazair. Kepentingan ekonomi Perancis di kawasan tersebut tidak sebesar kepentingan negara-negara superpower lainnya. Tetapi Perancis mempunyai pengaruh politis yang besar baik di Maroko maupun di Aljazair, karena Perancis adalah satu-satunya negara Barat yang mempunyai politik luar negeri yang aktif dan jelas terhadap Afrika.¹ Maka Perancis sebenarnya diharapkan untuk dapat mencarikan penyelesaian secara damai atas masalah ini.

Peranan Spanyol dalam masalah ini juga besar. Sejak Spanyol meninggalkan Sahara pada bulan Pebruari 1976 ia melepaskan segala tanggung jawabnya atas wilayah tersebut dan Raja Juan Carlos telah menegaskan legitimasi perjanjian segi tiga yang ditandatangani pada bulan Nopember 1975 itu. Hubungan antara Maroko dan Spanyol berjalan dengan lancar selama dua tahun, meskipun golongan sosialis Spanyol menentang perjanjian itu dan mendukung wilayah otonomi rakyat Sahrawi. Ketegangan antara Spanyol dan Aljazair telah mempererat hubungan Maroko-Spanyol. Sejak awal 1978, para nelayan Spanyol di lepas pantai Sahara telah menjadi sasaran Polisario. Pada bulan April, delapan nelayan Spanyol diculik setelah kapal mereka ditembaki dengan senapan mesin. Pada bulan Agustus, enam nelayan Spanyol terbunuh, sehingga AL Spanyol mengirim dua buah fregat untuk melindungi warga negaranya. Di bawah tekanan pendapat masyarakat, Pemerintah Spanyol menekan Aljazair untuk mengekang para gerilyawan Polisario. Pemerintah Aljazair menolak untuk bertanggung jawab atas kejadian-kejadian itu tetapi Spanyol tidak terkesan. Ketegangan antara Spanyol dan Aljazair itu menguntungkan Maroko.² Walaupun kemudian Spanyol berusaha untuk bersikap "lebih adil" dengan jalan memperbaiki hubungan dengan Aljazair, banyak faktor yang menyebabkan Spanyol akan tetap memelihara hubungan baik dengan Pemerintah Maroko.

1 *Ibid.*, hal. 62

2 *Ibid.*, hal. 58

PROSPEK PENYELESAIAN MASALAH SAHARA BARAT

Masalah Sahara Barat ini apabila dibiarkan berlarut-larut dapat membahayakan perdamaian dunia, karena dapat menjurus ke suatu perang terbuka antara Maroko dan Aljazair yang pasti akan melibatkan sekutu-sekutu mereka. Tetapi kelihatannya penyelesaian masalah ini bukanlah suatu hal yang mudah. Meskipun OAU mengakui perbatasan kolonial sebagai kerangka kerja untuk pembangunan bangsa, masih banyak negara-negara Afrika yang tetap menuntut kemerdekaan atau perubahan perbatasan berdasarkan sejarah, geografis maupun persamaan etnis. Dalam masalah Sahara Barat ini Maroko menganggap bahwa secara historis ia mempunyai hak kedaulatan atas wilayah tersebut.

Di samping itu, masalah kaum nomad, yang selalu hidup berpindah-pindah mulai dari pantai timur Afrika sampai ke pantai Samudera Hindia, juga merupakan faktor penting yang patut diperhatikan. Mereka tidak menginginkan perbatasan yang telah ditetapkan oleh pemerintah kolonial dan cenderung untuk menentang semua kekuasaan yang bertentangan dengan sistem kesetiaan dan kekeluargaan mereka. Di Sahara Barat mayoritas penduduknya adalah kaum nomadis dan hal itu tentu saja akan menimbulkan masalah bagi siapa saja yang ingin berkuasa di wilayah tersebut.¹

Kurangnya perhatian internasional terhadap masalah ini juga turut mempengaruhi penyelesaian masalah ini secara damai. Di satu pihak, tidak adanya campur tangan asing (superpower) dalam sengketa ini membuat masalah ini terbatas sebagai masalah regional. Di lain pihak, desakan Amerika Serikat, Perancis, Spanyol, negara-negara Arab dan Afrika terhadap semua pihak yang terlibat dalam sengketa ini untuk merundingkan masalah ini diharapkan akan membantu tercapainya penyelesaian damai, terutama apabila disertai dengan janji untuk membantu pembangunan ekonomi yang sangat diperlukan di wilayah itu. Hal ini sangat penting karena krisis ekonomi akibat perang yang berlarut-larut ini telah menyebabkan gejolak-gejolak politik di negara-negara yang terlibat dalam sengketa itu. Pergantian kepemimpinan (terutama apabila disertai kekerasan) di salah satu negara yang terlibat dalam sengketa itu sering menyebabkan perubahan kebijakan negara tersebut yang tidak menguntungkan prospek penyelesaian masalah tersebut secara damai.

Sementara itu, negara-negara OAU yang mendukung prinsip penentuan nasib sendiri mulai banyak yang menyatakan dukungannya terhadap RASD.²

1 Weinstein, *op. cit.*, hal. 111

2 "Western Sahara: Dark Days for Hassan", *Africa Confidential*, vol. 21, no. 14, hal. 4

Mungkin penentuan nasib sendiri yang dihasilkan oleh suatu penentuan pendapat rakyat di Sahara Barat adalah satu-satunya jalan yang terbaik untuk menyelesaikan sengketa ini setelah semua pihak melaksanakan gencatan senjata dan mengatasi krisis ekonomi di negaranya masing-masing.

KESIMPULAN

Setelah mempelajari latar belakang sengketa di Sahara Barat ini, maka dapat disimpulkan bahwa sengketa ini adalah suatu perebutan wilayah antara Maroko, Aljazair dan Mauritania yang akhirnya berkembang menjadi perang kemerdekaan rakyat Sahrawi. Dapat pula dikatakan bahwa sengketa ini timbul akibat penjajahan negara-negara Barat yang di masa lampau membagi-bagi wilayah jajahannya sesuai dengan kepentingan ekonomi mereka tanpa memperhatikan faktor sejarah, geografis dan persamaan etnis.

Ketiga negara yang terlibat dalam sengketa ini mempunyai kepentingan masing-masing atas wilayah tersebut. Aljazair mempunyai kepentingan ekonomi seperti yang telah dikemukakan di atas. Maroko mempunyai alasan politis-historis untuk menguasai wilayah itu. Sedangkan Mauritania menginginkan suatu daerah penyanggah guna mengurangi ancaman dari Maroko. Polisario, meskipun pada mulanya itu hanya merupakan salah satu instrumen politik luar negeri Aljazair, akhirnya tumbuh menjadi suatu gerakan nasionalis yang berjuang untuk kemerdekaan rakyat Sahrawi. Perjuangan Polisario bukan saja dalam bentuk perjuangan bersenjata melawan pasukan-pasukan Maroko dan Mauritania tetapi juga secara politis dan diplomatis di fora internasional. Semakin banyaknya dukungan negara-negara Afrika dan negara-negara anggota PBB lainnya terhadap RASD telah menunjukkan keberhasilan Polisario dalam meyakinkan negara-negara tersebut tentang hak rakyat Sahrawi untuk menentukan nasibnya sendiri.

Apabila sengketa wilayah yang berkembang menjadi suatu perjuangan rakyat Sahrawi ini dibiarkan berlarut-larut, hal ini dapat mengancam keamanan dan perdamaian di kawasan tersebut karena akan menjurus pada suatu perang terbuka antara Maroko dan Aljazair yang pasti akan melibatkan sekutu-sekutu mereka. Usaha untuk menyelesaikan masalah ini dengan damai harus segera dimulai dengan bantuan negara-negara besar yang hendaknya juga memberikan bantuan ekonomi yang sangat diperlukan. Adapun perkembangan selanjutnya akan tergantung dari hasil perundingan damai antara semua pihak yang terlibat dan dari hasil penentuan pendapat rakyat Sahrawi dalam menentukan masa depannya sendiri.



Untuk menunjang kegiatan studi mahasiswa, para peneliti maupun lembaga-lembaga universitas, instansi-instansi pemerintah dan umum, CENTRE FOR STRATEGIC AND INTERNATIONAL STUDIES (CSIS) menyediakan penerbitan berupa majalah dan buku-buku:

ANALISA

terbitan berkala, menyajikan beberapa analisa peristiwa dan masalah internasional dan nasional, baik ideologi dan politik maupun ekonomi, sosial budaya dan pertahanan serta keamanan, yang ditulis oleh staf CSIS maupun dari luar CSIS. Termasuk dalam seri ini adalah MONOGRAF yang membahas satu analisa tertentu. Harga per eks Rp. 500,— langganan setahun (12 nomor) Rp. 6.000,— sudah termasuk ongkos kirim, untuk Mahasiswa Rp. 4.800,—

THE INDONESIAN QUARTERLY

Majalah triwulan, memuat karangan-karangan hasil pemikiran, penelitian, analisa dan penilaian yang bersangkutan paut dengan masalah-masalah aktual Indonesia di forum nasional maupun internasional. Harga per eks Rp. 800,—, langganan setahun (4 nomor) Rp. 3.200,—

BUKU—BUKU

hasil penulisan staf CSIS baik mengenai strategi, ekonomi, ideologi, politik, hubungan internasional, pembangunan, hankam, sosial budaya dan lain-lain.

Penerbitan-penerbitan tersebut di atas dapat diperoleh di Toko-toko Buku, atau langsung pada:

BIRO PUBLIKASI — CSIS
CENTRE FOR STRATEGIC AND INTERNATIONAL STUDIES
 Jl. Kesehatan 3/13, Jakarta Pusat Telepon 349489

Untuk menunjang kegiatan pengkajian CSIS juga menyediakan PER-
 PUSTAKAAN dan CLIPPINGS yang terbuka untuk pencinta pengetahuan,
 analis dan peneliti dengan koleksi yang eksklusif, penyediaan data yang lengkap
 dan informasi yang cepat. Untuk keperluan tersebut hubungilah:
PERPUSTAKAAN CSIS dan BIRO INFORMASI DAN DATA CSIS
 Jalan Tanah Abang III/27, Jakarta Pusat, Telepon 356532-5

